

Daftar Kasus Korupsi Kehutanan yang Menarik Perhatian Publik

(pernah dilaporkan atau disampaikan ke KPK)

No.	Deskripsi Kasus Korupsi Kehutanan	Estimasi Kerugian Negara	Dugaan pihak yg bertanggungjawab	Perkembangan penanganan
01.	RKT bermasalah yang diberikan oleh Gubernur Riau. Tahun terjadi: 2003-2006	Rp. 1,1 triliun	Rusli Zainal (Gubernur Riau)	Belum jelas
02.	Pemberian izin IUPHHKHT oleh Bupati di 5 kabupaten di Riau terhadap 13 perusahaan yang diduga bermasalah. Tahun terjadi:	Rp. 2,8 triliun	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Bupati di Riau • RAPP cs. 	Belum jelas. Kepolisian Daerah Riau pernah menetapkan 200 tersangka (dari 14 perusahaan). Namun tanpa alasan yang jelas, kasus dihentikan (SP3)
03.	Alih fungsi hutan di Kabupaten Pelalawan, Riau. (sudah ditangani KPK, tapi belum tuntas)	Rp. 1,2 triliun	<p>Rusli Zainal (Gubernur Riau)</p> <p>Tersangka belum diproses/tdk jelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Burhanuddin (Bupati Kampar); • Asra Rahman (mantan Kadinas Kehutanan); • Syuhada Tasman (mantan Kadinas Kehutanan) 	<p>Azmun Djafar (sudah diproses)</p> <p>3 tersangka belum jelas prosesnya di KPK.</p>
04.	Pemberian izin HTI di Kabupaten Siak oleh Bupati SIAK, terhadap beberapa perusahaan di Siak.	Belum terhitung	Bupati Siak (tersangka)	Belum jelas
05.	Dugaan keterlibatan mantan Menteri Kehutanan terkait dugaan	Belum terhitung	Mantan menteri Kehutanan	Belum jelas

No.	Deskripsi Kasus Korupsi Kehutanan	Estimasi Kerugian Negara	Dugaan pihak yg bertanggungjawab	Perkembangan penanganan
	penyalahgunaan kewenangan untuk mempermudah pemberian izin di Riau, Sumatera Utara, dan sejumlah daerah.			
06.	Pemberian izin lokasi 23 perusahaan untuk perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. 8 pemilik perusahaan adalah saudara dan kroni Bupati Seruyan. >> Salah satunya adalah kasus KUCC (Kharisma Unggul Centratama Cemerlang)	Rp. 447 miliar (khusus PT. KUCC)	Darwan Ali (Bupati Seruyan)	Belum jelas
07.	PTPN VII: Perusahaan menggarap lahan sawit diluar HGU. Diperkuat pernyataan Ketua BPN Sumatera Selatan, bahwa wilayah yg digarap tersebut memang tanpa HGU. Penggarapan dilakukan sejak tahun 1982 – sekarang. Terjadi di Banyuasin dan Oganhilir No laporan: 2010/01/000/407.	Dikonversikan dari 10.000 hektar.	PTPN VII	Sejak dilaporkan tahun 22 Januari 2010. Perkembangan belum jelas.
08.	PT. Antang Gunda Utama (AGU). Pemberian izin lokasi 30.000 hektar kebun sawit di Barito Utara yang sebagiannya berada dalam konsesi HPH Austral Byna	Rp 1 triliun	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati Barito Utara, • BPN, • PT. Antang Guna Utama 	Belum jelas
09.	PT. Austral Byna Penerbitan RKT tahun 2003, 2004, 2005, dan 2007 oleh Dishutprop Kalteng dan Departemen Kehutanan.	Rp 108,8 miliar	<ul style="list-style-type: none"> • Kadishutprop Kalteng th 2003 → Tuah Pahoe. • Kadishut Kab. Barito Utara th 2003 → Toboryano 	Masih dalam proses pengembangan penyelidikan dan pengumpulan barang

No.	Deskripsi Kasus Korupsi Kehutanan	Estimasi Kerugian Negara	Dugaan pihak yg bertanggungjawab	Perkembangan penanganan
			Angga. • Bupati Barito Utara → Achmad Yuliansyah. • Dirut Austral Byna → Praditya Nitara. • Kadishutprop Kalteng 2004 dan 2005 → H. A. Basuniansyah. • Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut 2006 → Hadi Pasaribu.	bukti dan keterangan.
	TOTAL (estimasi terhitung)	Rp. 6.66 triliun		